



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	14 (<i>empat belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Hari, Tanggal	:	Rabu, 1 Juli 2020
Pukul	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun Anggaran 2020
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), Budi Harto, 3. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Agung Budi Waskito, 4. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 10.26 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 1 Juli 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid-19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan PT Utama Karya (Persero) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pencairan hutang pemerintah ke PT Utama Karya (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp1.882.437.154.067,-** (*Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang berupa kekurangan pembayaran Pemerintah terhadap pembelian lahan proyek Jalan Tol Tahun 2016-2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Pembelian lahan Tahun 2016, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp116.175.149.635,-** (*Seratus Enam Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
 - ii. Pembelian lahan Tahun 2017, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp760.654.042.206,-** (*Tujuh Ratus Enam Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).
 - iii. Pembelian lahan Tahun 2018, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp142.477.217.231,-** (*Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
 - iv. Pembelian lahan Tahun 2019, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp493.856.571.346,-** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
 - v. Pembelian lahan Tahun 2020, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp369.274.713.299,-** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
 - b. Total Cost of Fund sebesar **Rp959.029.038.544** (*Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), namun yang dihitung oleh Pemerintah sebesar **Rp466.462.500.989** (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), sehingga selisih Cost of Fund sebesar **Rp492.566.537.555** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*). Dari total Cost of Fund tersebut telah dibayar oleh Pemerintah sebesar **Rp90.722.926.791** (*Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa pencairan hutang Pemerintah sebesar **Rp59.911.756.692** (*Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) yang berupa kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek Jalan Tol Serang–Panimbang dari Tahun 2018 – 2020.

- b. Pembayaran *Cost of Fund* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar **Rp120.577.130.731** (*Seratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) terdiri dari **Rp65.250.430.104** (*Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Empat Rupiah*) sebagai pembayaran bunga beban Pemerintah (Lembaga Manajemen Aset Negara) dan **Rp55.326.700.627** (*Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) sebagai selisih *Cost of Fund* yang ditanggung oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
3. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan pencairan hutang Pemerintah kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2020 sebesar **Rp8.942.312.000.000** (*Delapan Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah*) yang berupa kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek Jalan Tol, dengan rincian sebagai berikut:
- a. *Outstanding* Pokok Dana Talangan:
 - i. Tol Mayoritas sebesar **Rp2.762.308.000.000** (*Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah*)
 - ii. Tol Minoritas sebesar **Rp943.942.000.000** (*Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*)
 - b. *Outstanding Cost of Fund*:
 - i. Tol Mayoritas sebesar **Rp506.742.000.000** (*Lima Ratus Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*)
 - ii. Tol Minoritas sebesar **Rp497.924.000.000** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*)
 - c. Selisih *Cost of Fund*:
 - i. Tol Mayoritas sebesar **Rp838.919.000.000** (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah*)
 - ii. Tol Minoritas sebesar **Rp1.472.477.000.000** (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
 - d. Piutang LRT Sumsel sebesar **Rp1.920.000.000.000** (*Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah*) yang bersumber dari realokasi anggaran Kementerian Perhubungan
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk segera melakukan renegosiasi terhadap kreditur agar bisa menekan *cost of fund* sekecil mungkin sesuai dengan Pembayaran Hutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
5. Komisi VI DPR RI akan membahas Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun 2020 kepada PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.23 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

FAISOL RIZA
A-33